

PERENCANAAN, REVISI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN OPD PEMERINTAHAN

Yeni Rafika Nengsih¹⁾, Andria Ningsih²⁾, Jennisa Dwina Indriani³⁾, Kuliman⁴⁾,
Miska Hairani⁵⁾

^{1,2,3,4}Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia

email: ¹yenirafika1@gmail.com

²andrianingsih56@gmail.com

³jennisadwindriani@gmail.com

⁴kulimanspirit@gmail.com

⁵hairanimis2@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the variables of budgeting, budget revision and human resource competence on budget absorption. The population is the Regional Apparatus Organization of the Fifty Cities Regency with the number of samples taken using purposive sampling with a total of 41. The data collection technique in this study is in the form of a questionnaire, while the data analysis technique used is Multiple Regression and Moderated Regression Analysis with Statistical Package for tools. the Social Sciences (SPSS). From the results of the tests that have been carried out, it shows that the independent variable has a significant effect on the dependent variable. The magnitude of the effect (Adjusted R2) by these three variables together on the dependent variable is 52.33%. While the remaining 47.66% (100% -52.33%) is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: *Budgeting, Budget Revision, Human Resource Competence, Budget Absorption*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh variable penyusunan anggaran, revisi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Populasinya merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah pengambilan sample dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah 41. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berbentuk kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Multiple Regression dan Moderated Regression Analysis dengan alat bantu Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variable bebas bebas berpengaruh signifikan terhadap variable terikat. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan (Adjusted R2) oleh ketiga variable ini secara bersama-sama terhadap variable terikatnya 52,33%. Sedangkan sisanya sebesar 47,66% (100% - 52,33%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Penyusunan anggaran, Revisi Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penyerapan Anggaran.

Detail Artikel:

Diterima: 19 Januari 2022

Disetujui: 3 Februari 2022

DOI: [10.47896/ab.v2i2.486](https://doi.org/10.47896/ab.v2i2.486)

PENDAHULUAN

Prosedur pelaksanaan keuangan daerah dimulai dengan membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses paling awal dalam kesuksesan pelaksanaan keuangan adalah perencanaan anggaran yang baik. Perencanaan anggaran menjadi faktor dalam pencapaian serapan anggaran di akhir periode, yang menunjukkan tingkat capaian realisasi dibandingkan target diawal tahun. Apabila salah dalam memperhitungkan biaya Perencanaan dapat mengakibatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran harus dilakukan peninjauan ulang. Revisi mengakibatkan harus melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan jadwal pelaksanaan, dan dilakukan pengunduran waktu pelaksanaan. Sebelum melaksanakan kegiatan dan program harus ada persetujuan dari revisi DPA disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, karena belum ada alokasi anggaran dari kegiatan dan program tersebut.

Masalah Slow back-loaded, juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Pola semacam ini tentu tidak sehat untuk mencapai kemakmuran masyarakat secara umum. hasil realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020. capaian penyerapan anggaran Kabuapten Lima Puluh Kota memiliki penyerapan yang belum maksimal dan pola penyerapan anggaran dari triwulan ke triwulan belum memenuhi target proporsional. Padahal untuk ukuran penyerapan anggaran triwulan, telah ditargetkan perencanaan penarikan dana per triwulan sebesar 25%. Merujuk pada rencana target yang telah ditetapkan, terlihat adanya ketidak proporsionalan dalam penyerapan anggaran. Pada data penyerapan 2016-2020 menunjukkan rata-rata penyerapan pada triwulan I hanya 14,38%, dan triwulan II sekitar 19,92%. Sekalipun pada triwulan III penyerapan anggaran cukup ideal dari segi pencapaian tiap triwulan yaitu sebesar 26,1% akan tetapi secara kumulatif belum menyentuh angka ideal yaitu 70-75%, namun hanya berkisar angka 60,4%. Hal tersebut berarti bahwa anggaran yang akan dicairkan pada triwulan IV mencapai angka 39,6% dari anggaran belanja yang ditargetkan terserap 100%. Selain itu, perekenomian nasional secara umum juga menjadi dampak dari hal. Pertama, dalam peningkatan pertumbuhan ekonomis yang efektif kebijakan fiskal tidak berjalan. Kedua, terjadinya idle money.

TELAAH LITERATUR

Penyerapan anggaran Halim (2014) mengatakan bahwa suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Sedangkan Kuncoro (2013) menyatakan salah satu dari beberapa tahapan dalam penyerapan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

Robbin dkk (2014) perencanaan yaitu membuat suatu strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Haryanto, dkk (2007) dalam Asikin (2012) anggaran sector public merupakan rencana kegiatan dan keuangan periodic (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang dieproleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Revisi merupakan merubah rincian biaya yang sebelumnya pada APBN tahun berjalan dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Sumber daya manusia secara makro merupakan warga Negara yang memiliki potensi yang masih produktif dalam memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Badriyah, 2015). Sedangkan Suharto (2012) dalam Muhammad Iqbal (2018) mengatakan bahwa kualitas dan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang. Latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, Teknik analisis data yang digunakan yaitu: Multiple Regression dan Moderated Regression Analysis (SPSS). menggunakan purposive sampling dengan jumlah 41 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode pengumpulan data observasi, dan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas dengan korelasi pearson, instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi (r) = 0.3 (Ghozali, 2013).

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel	Nilai	Keterangan
Perencanaan anggaran	,781	Valid
Revisi anggaran	,780	Valid
Kompetensi Sumberdaya manusia	,688	Valid
Penyerapan Anggaran	,604	Valid

Menunjukkan nilai korelasi semua item pertanyaan/pernyataan dari semua variabel pada kuesioner memiliki nilai di atas atau lebih besar sama dengan 0.03 (=0.3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan/pernyataan telah memenuhi syarat validitas.

Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* di atas atau lebih besar sama dengan 0.6 (=0.6).

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai	Keterangan
Perencanaan anggaran	,771	Valid
Revisi anggaran	,780	Valid
Kompetensi Sumberdaya manusia	,688	Valid
Penyerapan Anggaran	,604	Valid

Nilai cronbach alpha kelima variabel penelitian memiliki nilai di atas atau lebih besar sama dengan 0.6 (=0.6). instrumen penelitian telah memenuhi persyaratan valid dan reliabel, sehingga data yang diperoleh dari instrumen penelitian (kuesioner) dapat digunakan untuk analisis pada tahapan selanjutnya.

Hasil Pengujian Regresi Parsial

Tabel 3
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	-7.893	4.532		-1.742	.088		
	x1	.300	.115	.288	2.606	.012	.770	1.299
	x2	.544	.152	.386	3.588	.001	.812	1.231
	x3	.500	.223	.268	2.244	.029	.661	1.513

a Dependent Variable: y

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	96.450	3	32.150	18.362	.000(a)
	Residual	89.295	51	1.751		
	Total	185.745	54			

a Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b Dependent Variable: y

Tabel 5
Hasil Uji t
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.893	4.532		-1.742	.088
	x1	.300	.115	.288	2.606	.012
	x2	.544	.152	.386	3.588	.001
	x3	.500	.223	.268	2.244	.029

a Dependent Variable: y

Semakin baik perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain program dan kegiatan dalam satu tahun lancar, apabila semakin matang para pengelola dan perencanaannya, maka akan tercapai target penyerapan anggaran.

Bakara (2000) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pembangunan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah perencanaan estimasi biaya mampu meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga tingkat pencapaian target lebih tinggi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), juga menunjukkan bahwa faktor perencanaan berpengaruh penelitian tersebut menemukan beberapa faktor yang menjadi permasalahan yaitu pemblokiran kegiatan, pengesahan yang terlambat, perlu direvisi serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan DIPA. Senada dengan hasil penelitian dilakukan oleh Ulfa (2013) yang dilaksanakan pada Sekretariat

DPRD DKI Jakarta T.A 2010, menemukan bahwa tidak sesuai dengan prinsip mengakibatkan keterlambatan pengesahan, sehingga menghambat penyerapan anggaran. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang lain seperti Sulaeman, et al. (2011), , Nina et al. (2016), Ledy.S et al. (2016). bahwa semakin baik revisi maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiono (1997) yang menunjukkan bahwa lambannya realisasi daya serap keuangan tidak semestinya. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran belum memadai secara merata dan semakin terbengkalai. Hevesi (2005) juga yang menyimpulkan kompeten bisa menghindari keterlambatan realisasi anggaran belanja. Kompetensi yaitu kemampuan kerja setiap individu mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Putri (2014) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

SIMPULAN

Berpengaruh positif signifikan faktor perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa semakin matang aparatur pemerintah dalam merencanakan, maka setiap program kerja/kegiatan tersebut dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik pula, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. berpengaruh positif signifikan faktor revisi anggaran terhadap penyerapan anggaran. Dengan kata lain semakin sesuai antara harga bahan dan jasa terhadap anggaran , maka program dan kegiatan akan berjalan dengan baik, Dan berpengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna apabila mempunyai kompetensi sumber daya yang mampu mengelola keuangan dengan baik maka akan memengaruhi perilaku kerja aparatur pemerintah yang kemudian akan memengaruhi kinerja organisasi secara umum. Artinya, semakin baik dalam pengelola anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah target penyerapan anggaran. Sarannya diharapkan adanya rotasi Pegawai Perencanaan untuk memaksimalkan Profesional Kerja, karena banyak Pegawai yang sudah lebih dari 5 tahun masa kerja di jabatan yang sama. Serta adanya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan atau bimbingan pengembangan ilmu dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2018). *Tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD*. Retrieved 9 Desember 2018, from www.wordpressdprd.com
- ADM.NEGARA. (2014). *Akuntabilitas Publik (Public Accountability) sebagai Pilar Good Governance*. Retrieved 10 Desember 2018, from <http://administrasinegaraku.blogspot.com>
- Arif, E. (2012) *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 19 No.2 Desember 2012*.
- Arif, Emkhad dan Abdul Halim. (2013) *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Makalah disajikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013*.
- Bastian.Indra. (2009) *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bidang Organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota. (2018). *Penilaian E-SAKIP 2017 oleh Menpan-RB RI*.
- BPKP . 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran Yogyakarta : Paris Review*.

- (2012) Mencari Solusi bagi serapan yang tersumbat, Jakarta Timur : Warta Pengawasan
- Dadan Ramdhani. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi terhadap anggaran.
- Deddi Nordiawan. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama. (2008). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 pasal 1 ayat 2 tahun 2008.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. Perencanaan dan penganggaran Daerah Khusus Keuangan Daerah. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadel Muhammad. (2008). *Reinventing Local Government Pengalaman dari Daerah*. . Jakarta: Gamedia.
- Fitriany Nur. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di Kementerian Lembaga di Wilayah Jakarta, FE Universitas Indonesia Jakarta.
- Ghojali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan ke VII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
- Hendris Heryanto. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di Kementerian Lembaga di Wilayah Jakarta, FE Universitas Indonesia Jakarta.
- Indra Bastian. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 28. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Realsiasi Dana Desa Tahun 2017*.
- Kadek Mia Ranisa Putri dkk. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumebr Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Lintang Venusita. (2008). Partisipasi Anggaran dan Keterlibatan Kerja Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan SIER). *Economic industri*, 4-5.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Malahayati Cut. 2015. Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggran dan Pelaksanaan Anggran terhadap Serapan Anggaran SKPD Pemkot Banda Aceh. Tesis. Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.: . Penerbit Andi.
- Minbang Kabupaten Lima Puluh Kota (2018). [Laporan Realisasi Fisik Keuangan APBD periode Agustus 2018].
- Miliasih. R. 2012. Analisa Keterlambatan Penyerahan Anggran Belanja Satuan Kerja Kementrian Negara Lembaga / Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis, Universitas Indonesia.
- Muhammad Iqbal. (2018). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*.
- Natya Sekar Harum. (2016). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial OPD (Studi Pada OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota)*. (Skripsi), Universitas Riau.
- Padang Expres. (2018). Kabupaten Lima Puluh Kota ditolak Revisi Anggaran. Retrieved 4 Agustus 2018

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 (2017). tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja OPD
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72. (2017). tentang penjabaran APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33. (2017). tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 pasal 1 ayat 35. (2005). Pedoman Penyusunan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 pasal 1 ayat 40. (2005). tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK02/2010 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia
- Purtanto. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (Studi atas Persepsi pada Pegawai Bersertifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tegal).
- Putri, Carlin Tasya. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Pratama, R. (2008). *Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan Motivasi sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada OPD di Kota Padang)*. (Journal), Universitas Negeri Padang, Padang.
- Prihandini, A. N. (2011). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi* (Skripsi).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Robbins dan Coulter, 2002. Management, 7th edition. Prentice Hall, Inc., New Jersey.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sekaran, Umar. 2006. Metode Penelitian dan Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Kabul Wahyu. 2002. "Kepemimpinan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Cityzenship (OCB), Kepuasan Kerja dan Perilaku Organisasional (Penelitian Empiris pada Pemda Kota Kebumen)" dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Vol. 2, Hlm 34-52
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Tahun 2005 Nomor 40.
- Sensus Penduduk. (2018). Kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka.
- Wieske Anneleen. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungnan Universitas SAM Ratulangi.
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Yumiati, Fenny. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan anggaran dan komitmen organisasi terhadap serapan anggaran SKPA di Pemerintah Aceh. Tesis Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Zarinah, Monik. 2016. "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara". Tesis Pascasarjana Universitas Syiah Kuala